

MENGHADAPI KETIDAKPASTIAN EKONOMI : STRATEGI MENUJU KESTABILAN MAKRO DI INDONESIA

M.Akasyah Abdurahman¹, M.Ghilman Azkiyya², Firman Yassir Al Amin³, Siti Launa Zulfa⁴

^{1,2,3,4}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

email:

¹makasyahabdurahman@gmail.com*

²ghilman126@gmail.com

³Yassirfirman901@gmail.com

⁴sitilaunazulfa@gmail.com

Keywords:

ketidakpastian ekonomi, Indonesia, kebijakan fiskal, perlindungan sosial, pembangunan berkelanjutan

Abstract

Indonesia menghadapi ketidakpastian ekonomi yang signifikan akibat faktor global, seperti fluktuasi harga komoditas, aliran modal asing, dan volatilitas pasar keuangan. Selain itu, tantangan domestik seperti ketimpangan ekonomi, produktivitas yang rendah, dan infrastruktur yang kurang memadai memperburuk situasi, sehingga menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional. Sebagai respons, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan moneter dan fiskal untuk memastikan stabilitas makroekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan melindungi kesejahteraan masyarakat rentan. Artikel ini membahas pendekatan strategis dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi, termasuk penguatan sektor ekonomi utama, peningkatan perlindungan sosial, pengembangan kerja sama internasional, penerapan inovasi ekonomi, dan pengembangan sumber daya manusia. Pendekatan holistik dan terpadu diharapkan dapat meningkatkan ketahanan dalam menghadapi tantangan ekonomi global, Indonesia berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

A. INTRODUCTION

Sebagai negara dengan perekonomian terbuka dan dekat dengan pasar internasional, Indonesia tidak bisa lepas dari dampak ketidakpastian perekonomian global. Fluktuasi harga komoditas, perubahan aliran modal asing, dan ketidakstabilan pasar keuangan dapat berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan kesejahteraan sosial Indonesia.

Selain itu, Indonesia juga menghadapi tantangan domestik yang kompleks seperti kesenjangan ekonomi, rendahnya produktivitas, dan infrastruktur yang tidak memadai. Ketidakpastian perekonomian global seringkali memperburuk kondisi perekonomian domestik, sehingga menyulitkan pemerintah untuk mencapai tujuan

pembangunan nasional seperti pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Pemerintah Indonesia menjawab tantangan ini dengan berbagai instrumen kebijakan ekonomi. Kebijakan fiskal dan moneter dilaksanakan untuk memastikan stabilitas makroekonomi, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan melindungi masyarakat dari dampak negatif ketidakpastian perekonomian. Namun tantangannya masih besar dan memerlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi.

Oleh karena itu, tujuan dari artikel ini adalah untuk mempertimbangkan berbagai strategi yang dapat diterapkan Indonesia untuk menghadapi ketidakpastian perekonomian dan mencapai stabilitas makroekonomi yang berkelanjutan. Strategi tersebut antara lain penguatan sektor ekonomi utama, perlindungan sosial bagi kelompok rentan, kerja sama internasional, inovasi ekonomi, dan pengembangan sumber daya manusia. Pendekatan yang holistik dan terpadu diharapkan akan memungkinkan Indonesia mengatasi tantangan ketidakpastian perekonomian dengan lebih baik dan mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat secara keseluruhan.

B. LITERATURE REVIEW

Ketidakpastian perekonomian dunia menjadi kekhawatiran utama negara-negara pendukung perekonomian terbuka, termasuk Indonesia. Krisis keuangan global tahun 2008 menunjukkan bahwa dampak ketidakpastian ini dapat menimbulkan krisis perekonomian nasional yang disebabkan oleh perubahan aliran modal secara tiba-tiba, fluktuasi harga komoditas, dan ketidakstabilan pasar keuangan internasional (Baker & Nelson, 2018).

Dalam konteks Indonesia, ketidakamanan global diperburuk oleh tantangan domestik seperti kesenjangan ekonomi, rendahnya produktivitas, dan infrastruktur yang tidak memadai. Tantangan perekonomian global yang semakin kompleks, seperti meningkatnya ketegangan geopolitik dan digitalisasi, juga meningkatkan ketidakpastian. Ketegangan ini telah menyebabkan meningkatnya proteksionisme dan penurunan volume perdagangan internasional, sehingga berdampak pada kinerja perekonomian global dan penurunan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (Farooq et al, 2019).

Menteri Keuangan RI juga menekankan bahwa kebijakan suku bunga tinggi di negara maju berdampak langsung pada likuiditas global dan aliran modal ke emerging market yang seringkali menyebabkan capital outflow dari Indonesia. Menyikapi hal tersebut, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dan moneter berperan penting dalam menjaga stabilitas makroekonomi.

Sebuah studi oleh Yusup dkk. (2022) menunjukkan fleksibilitas kebijakan moneter sebagai berikut : Penyeimbangan kembali dan realokasi anggaran merupakan langkah penting dalam merespons situasi yang tidak menentu. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai inisiatif, antara lain pengendalian harga pangan, pemberian bantuan langsung tunai (BLT), dan percepatan penyaluran Kredit Rakyat (KUR), yang secara kolektif membantu menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian. Selain itu, literatur menunjukkan bahwa pengembangan sektor ekonomi digital dan inovasi teknologi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Sebuah studi oleh Juergensen dkk. (2020) menyoroti pentingnya digitalisasi dalam meningkatkan efisiensi perekonomian, terutama pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Digitalisasi yang didukung oleh e-commerce dan teknologi informasi dapat membantu UMKM memperluas pasar dan menjadi lebih kompetitif dalam menghadapi perubahan perekonomian global. Literatur juga menekankan bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan elemen penting dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian.

Sebuah studi oleh Kee dkk. (2019) menunjukkan bahwa memperkuat kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan meningkatkan produktivitas, yang pada akhirnya, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Akibatnya, analisis literatur ini menunjukkan bahwa mencapai stabilitas ekonomi dalam kondisi yang tidak menentu memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup kebijakan ekonomi adaptif, dukungan terhadap inovasi digital, dan pengembangan sumber daya manusia. Strategi tersebut bertujuan untuk membantu Indonesia mengatasi tantangan perekonomian global dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

C. METHOD

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kepustakaan. Sumber penelitiannya berasal dari berbagai literatur pustaka, seperti buku ekonomi makro, artikel jurnal, makalah, skripsi, tesis, disertasi dan berbagai literatur lainnya tentang objek penelitian. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Adapun jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Analisis data dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah reduksi data, di mana peneliti menyaring data, memfokuskan data dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan objek penelitian yaitu tentang esensi hukum bisnis syariah. Kedua, sajian data. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data terkait dengan esensi hukum bisnis syariah dan menyajikannya dalam bentuk narasi deskripsi, sehingga data mudah dipahami dan diinterpretasikan. Ketiga, kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan penarikan benang merah sebagai suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya khususnya tentang esensi hukum bisnis syariah.

D. RESULTS and DISCUSSION

Krisis keuangan tahun 2008, yang berdampak pada sebagian besar dari negara di dunia, membuat kita memikirkan dampak ketidakpastian terhadap kondisi makroekonomi. Situasi ini didukung oleh ketidakpastian kebijakan ekonomi akibat situasi sosial politik yang ada. Sebagai negara berkembang dengan perekonomian yang sangat terbuka, Indonesia tidak kebal terhadap dampak ketidakpastian terhadap situasi perekonomian global. Konsep dampak yang terjadi ketika perekonomian domestik merespon perubahan perekonomian global disebut dengan efek limpahan (*spillover effect*)(Adolph, 2016).

Ekonomi dapat dirasakan dari berbagai perspektif. Ekonomi dapat didefinisikan sebagai studi tentang cara manusia memenuhi keinginannya dengan menggunakan sumber daya alam yang tersedia bagi mereka. Ekonomi dapat dianggap sebagai cabang ilmu yang independen dengan seperangkat kualifikasinya sendiri. Sebenarnya, perilaku ekonomi berkaitan dengan preferensi manusia dalam berpikir dan bertindak. Sementara preferensi manusia sangat bergantung pada nilai-nilai yang mereka anut, baik di dalam maupun di luar diri mereka sendiri. (Janwari, 2013). Selain itu, ekonomi dapat berfungsi sebagai sistem yang

terjalin erat dengan kebijakan suatu negara, yang jelas dipengaruhi oleh ideologi, politik, bersama dengan hukum yang saling berhubungan (Janwari et al., 2024). Guncangan perekonomian dunia dapat ditularkan secara langsung melalui saluran keuangan, dan saluran keuangan dianggap lebih rentan dibandingkan saluran perdagangan. Saluran keuangan dalam hal ini dapat dicontohkan dengan menurunnya harga saham global dan menurunnya laba perusahaan-perusahaan di negara maju, yang secara langsung berdampak pada menurunnya likuiditas pasar keuangan global. menjelaskan bahwa bisnis ekonomi berfokus pada masalah dan masalah ekonomi terkait dengan organisasi bisnis, manajemen, dan strategi. Masalah ini mencakup penjelasan tentang sejarah berdirinya dan perkembangan perusahaan, serta alasan pengembangannya secara horizontal, vertikal, dan spasial. Ini juga mencakup peran pengusaha dan kewirausahaan serta pentingnya struktur organisasi. Ini juga mencakup hubungan perusahaan dengan karyawan, penyedia modal, pelanggan, dan pemerintah, serta hubungan antara perusahaan dan lingkungan bisnisnya (Yusup et al., 2019). Kurangnya likuiditas dan ketidakpastian perekonomian di negara maju akan menyebabkan penurunan volume investasi.

Menteri Keuangan RI mengatakan, Ada tiga faktor yang menyebabkan ketidakpastian. Pertama, kebijakan suku bunga tinggi kemungkinan akan diperpanjang. Dalam pandangannya, pasar memperkirakan suku bunga akan turun dalam waktu dekat, namun suku bunga saat ini akan tetap tinggi untuk waktu yang lama, yang berarti likuiditas di seluruh dunia akan tetap ketat, dan aliran modal ke negara-negara yang berkembang, termasuk Indonesia, akan terpengaruh atau terjadi outflow, kata rapat kerja Komite XI DPR RI dengan kementerian. Keuangan, Selasa (19 Maret). Kedua, Menteri Keuangan menyatakan bahwa di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, muncul ketidakpastian dalam berbagai aktivitas keuangan seperti perdagangan. “Proteksionisme meningkat, investasi terdampak, dan tentunya berdampak pada kinerja perekonomian dunia,” ujarnya. Ketiga, masalah kontemporer seperti digitalisasi, perubahan iklim, dan demografi saat ini mempunyai dampak yang sangat mengganggu terhadap populasi lansia, terutama di negara-negara maju. Menteri Keuangan lebih lanjut menambahkan bahwa kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) akan menjadi risiko global terbesar kedua pada tahun 2024, setelah perubahan iklim. “AI saat ini dianggap sebagai risiko global terbesar kedua atau kedua pada

tahun 2024, dengan perubahan iklim dianggap sebagai risiko terbesar dan penuaan populasi juga berdampak pada kinerja perekonomian,” ujarnya (Francisco et al., 2015).

Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat rentan terhadap guncangan ekonomi eksternal. Sumber guncangan eksternal antara lain kondisi keuangan global, pelemahan ekonomi di Tiongkok dan beberapa negara maju, dan perubahan harga minyak, dan perang dagang AS-Tiongkok. Kebijakan tarif impor AS telah memicu perang dagang dengan Tiongkok, dan kedua negara tersebut telah mengambil langkah untuk memutus aliran produk industri antara kedua negara.

Perang dagang di tingkat internasional adalah akibat dari perubahan kebijakan ekonomi antara dua negara, yang mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi secara global. dan juga berdampak pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (DepartemenKebijakanEkonomidanMoneter, 2018). Dalam beberapa dekade terakhir, Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia memiliki potensi transaksi digital yang besar. Hasil studi tahun 2020 oleh Google, Temasec, dan Bain & Company menunjukkan bahwa Indonesia memiliki nilai transaksi ekonomi digital tertinggi di wilayah itu senilai US\$ 44 miliar dan diperkirakan akan mencapai US\$ 124 miliar. pada tahun 2025. Oleh karena itu, tentu saja harus ada lembaga keuangan sentral yang bertanggung jawab atas pengawasan transaksi digital, yang memiliki peran dan tugas sebagai regulator untuk mengawasi transaksi keuangan berbasis digital di Indonesia. Tujuan dibentuknya lembaga tersebut adalah untuk memantau dan mendeteksi potensi risiko yang dapat timbul, sehingga dapat segera diatasi ketika terjadi permasalahan (Yusup, 2022a). Permasalahan paling krusial yang dihadapi masyarakat saat ini adalah investasi dan perdagangan aset kripto, yang mana banyak investor dan masyarakat terjebak dan mengalami kerugian. Namun, di satu sisi Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat bertindak lebih jauh karena belum ada kepastian hukum yang jelas dalam mengatur investasi ilegal daring tersebut (Yusup, 2022b).

Untuk mengetahui dampak ketidakpastian perekonomian, telah dikembangkan indeks ketidakpastian yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi. Saat melakukan penilaian terhadap indeks ketidakpastian kebijakan ekonomi, beberapa metode digunakan untuk mengukur presisi, bias, dan tingkat konsistensi indeks. Artinya, dilakukan dengan membandingkan ukuran ketidakpastian kebijakan ekonomi, menunjukkan adanya

hubungan yang kuat antara ukuran ketidakpastian kebijakan ekonomi dengan ukuran ketidakpastian ekonomi negara lain. Gunakan bersama dengan indeks pengukuran politik lainnya. Indeks ini juga tervalidasi pasar dan berisi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan, memungkinkan kami menyediakan indeks yang memenuhi kebutuhan bisnis, bank, dan pembuat kebijakan (Baker & Nelson, 2018).

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia perlu meningkatkan daya dan kapasitas sumber daya manusianya sebanding dengan kemajuan dan kekuatan teknologi itu sendiri. Hal ini merupakan kebutuhan yang sangat penting, terutama di industri seperti perbankan, telekomunikasi, dan lembaga pemerintah, dimana semua negara di dunia kini mengandalkan teknologi informasi sebagai landasan kekuatan dan pembangunan ekonomi secara simultan. Kita harus sadar bahwa teknologi informasi akan terus maju setiap tahunnya tanpa batas. Faktor sumber daya manusia sangat penting dalam berbagai jenis permasalahan teknologi informasi. Oleh karena itu, negara-negara harus bersiap untuk mencegah berbagai ketidakseimbangan yang mungkin timbul akibat pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi. Terkait dengan kebijakan pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian yang terjadi di Indonesia, Menteri Keuangan RI menyampaikan: “Inilah situasi yang sedang kita hadapi”. Kami akan terus memperbaiki beberapa faktor yang khususnya berdampak pada kelompok 40 persen masyarakat terbawah. Sri Mulyani pada Selasa (7 November 2023) mengatakan, “Harga beras telah meningkat cukup tajam selama enam bulan terakhir, sehingga inflasi terkait pangan yang bergejolak menjadi salah satu faktor terbesarnya”.

Dalam konteks ini, pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi ketidakpastian global. Pertama, pemerintah terus bekerja sama dengan BPS melalui Badan Pangan Nasional untuk mengendalikan harga beras dan menjamin pasokan hingga musim tanam dan panen berikutnya, kata Menteri Keuangan. Kedua, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT), yang meningkatkan daya beli masyarakat. Anggaran total sebesar 7,52 triliun rupiah akan dialokasikan untuk memberikan bantuan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan tarif Rp200.000 per bulan. Ketiga, pemerintah berusaha mempercepat penyaluran kredit ekonomi. “Menteri Koordinator (Perekonomian), saya dan sejumlah menteri lainnya, menilai alokasi KUR tahun

ini sedikit lemah. “Kami berencana meminta agar pembiayaan proyek-proyek tersebut dipercepat”. Menkeu menambahkan, alokasi KUR baru terealisasi sebesar Rp 107 triliun hingga September 2023 dari Rp 297 triliun. Untuk itu, pemerintah berencana mempercepat distribusi KUR selama tiga bulan terakhir. Keempat, kami mendukung bisnis real estat. Pemerintah memberikan insentif kepada rumah dengan harga hingga Rp 2 miliar melalui pajak pertambahan nilai yang ditanggung negara (PPN DTP). Kelima, Kementerian Sosial (Kemensos) akan memberikan dukungan biaya administrasi kepada 4 juta masyarakat berpenghasilan rendah pada Desember 2024 (*5 Strategi Pemerintah Dalam Menghadapi Ketidakpastian Global, Siapkan BLT Hingga KUR*, n.d.).

Adapun beberapa kebijakan dari pemerintah setelah wabah covid 19 menyerang Negara Indonesia. Pandemi COVID-19 telah memiliki dampak yang signifikan dan luas terhadap perekonomian, mengubah seluruh sistem ekonomi dan berbagai industri. Karena keadaan ini, para ahli telah melakukan penilaian menyeluruh tentang model kegiatan bisnis dan pola pemasaran yang paling tepat untuk bertahan dari krisis. (Yusup et al., 2020). Penyebaran wabah memerlukan persiapan sistem pendukung medis, baik peralatan, obat-obatan, rumah sakit, dan tenaga medis, namun yang jelas APBN pada tahun 2020 pada awalnya tidak memiliki sumber daya untuk menangani pandemi tersebut.

Merebaknya infeksi virus corona baru COVID-19 muncul dengan tiba-tiba. Namun, APBN bersifat fleksibel dan dengan cepat merespons peningkatan kebutuhan anggaran kesehatan secara tiba-tiba melalui penataan kembali dan realokasi. Dari perspektif kebijakan fiskal nasional, langkah-langkah restrukturisasi dan realokasi anggaran merupakan langkah awal dalam memerangi pandemi virus corona. Kebijakan ini merupakan bukti bahwa perhatian dan ekspektasi telah diberikan pada keuangan negara sejak awal sehubungan dengan penyebaran virus corona baru. Kebijakan penataan kembali dan realokasi ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 2020, dan mewajibkan para Menteri dan pimpinan lembaga untuk mengalokasikan dana yang tersedia untuk kegiatan dukungan respons cepat yang perlu disalurkan kembali. Akibat dampak infeksi virus corona baru (kegiatan reorganisasi/relokasi rumah tangga). Arahan Presiden mencakup lima arahan:

1. Memprioritaskan penggunaan alokasi yang tersedia untuk upaya percepatan tanggap COVID-19 (realignment of events dan realignment of budget).
2. Untuk mempercepat penataan kembali kegiatan dan realokasi sumber daya anggaran melalui mekanisme perubahan anggaran. Selain itu, sesuai dengan kewenangannya, pihaknya segera menyampaikan usulan perubahan anggaran kepada Menteri Keuangan.
3. Menyederhanakan dan memperluas akses untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa di bawah dan memberikan dukungan respon cepat terhadap COVID-19.
4. Berkolaborasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Negara dan Otoritas Pengawasan Pembangunan Keuangan untuk pengadaan barang dan jasa guna mempercepat respons terhadap COVID-19.
5. Pengadaan alat kesehatan dan barang serta jasa teknologi kesehatan untuk penanggulangan COVID-19.

Untuk mendanai respons COVID-19, Perintah Eksekutif ini mewajibkan anggota Kabinet dan kepala badan untuk memberikan dukungan keuangan, terutama untuk pengeluaran non-prioritas (misi, biaya konferensi, biaya, dan pengeluaran lainnya yang diarahkan untuk memberikan dukungan).

Selain melakukan rekonsentrasi dan realokasi, pemerintah juga memberikan stimulus untuk menangani efek pandemi. Selain menyebabkan biaya yang sangat tinggi untuk penanganan, pandemi COVID-19 telah menimbulkan ketidakpastian dan tekanan pada berbagai aspek kehidupan dan ekonomi. Akibatnya, fokus utama dari stimulus adalah menjaga kesehatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan membantu dunia usaha selama pandemi. Ini diberikan karena selama pandemi, semua sektor ekonomi menghadapi tekanan yang signifikan dan intervensi ekonomi yang signifikan. Akibatnya, selain melakukan pencegahan dan penanganan di bidang kesehatan, pemerintah juga mengeluarkan stimulus yang diprioritaskan untuk menjaga perekonomian rumah tangga dan bisnis, serta menjaga stabilitas keuangan. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Beberapa masalah yang timbul ketika munculnya ketidakpastian ekonomi yaitu masalah pengangguran dan kemiskinan. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang atau kelompok tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka secara finansial dan meningkatkan taraf hidup mereka (Syawie, 2011). Sebagaimana dijelaskan oleh Sadono Sukirno (1994), pengangguran adalah keadaan di mana individu yang termasuk dalam angkatan kerja berusaha untuk mendapatkan pekerjaan tetapi tidak dapat melakukannya. Kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah terbesar karena ketidakpastian ekonomi yang di rasakan di negara ini. Selain itu, kesejahteraan Indonesia yang ditunjukkan dengan variasi yang setara menunjukkan bahwa penerapan CPTPP dapat meningkatkan kesejahteraan Indonesia. Namun, penerapan CPTPP dengan melibatkan Korea, Filipina, Thailand, dan China menyebabkan peningkatan kesejahteraan Indonesia tetapi tidak sebesar saat tanpa mereka. Hukum Islam cenderung ke arah perdagangan bebas dan mengutuk pengenaan tarif pada perdagangan dengan negara lain. Bahkan ketika tarif dikenakan, mereka diberlakukan berdasarkan timbal balik. Penerapan CPTPP sebagai latihan penghapusan tarif memberikan masalah (diproksikan oleh pendapatan dan kesejahteraan) bagi perekonomian Indonesia. Secara umum, ini membenarkan penghapusan tarif yang dipromosikan oleh hukum Islam (Munandar et al., 2020)

Salah satu upaya untuk mengatasi ketidakpastian perekonomian adalah dengan menjalin kerja sama internasional dan regional, misalnya antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Kemajuan dalam penerapan kerangka pembayaran mata uang negara-negara di Indonesia, Malaysia, dan Thailand telah menunjukkan nilai dan tren yang baik sejak penerapannya secara de facto pada tahun 2018. Menurut Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia, transaksi LCS biasanya dilakukan dalam mata uang lokal antara Indonesia dan Thailand, dengan ringgit Malaysia (MYR) dan baht Thailand (THB) mencatatkan keuntungan. LCS MYR meningkat dari \$22,5 juta per bulan pada tahun 2018 menjadi \$49,6 juta per bulan pada tahun 2019 dan lebih dari \$50 juta pada tahun 2020. Sedangkan LCS mencatatkan transaksi sebesar THB pada tahun 2018 hingga 2019, meningkat dari \$9,2 juta menjadi \$13,7 juta per bulan (Sjamsudin, 2021). Pada tahun 2020, transaksi THB LCS juga menurun menjadi \$12,1 juta karena pandemi COVID-19. Tren transaksi LCS pada tahun 2021 (hingga April 2021) adalah LCS Malaysia sebesar \$42,9 juta

dan LCS Thailand sebesar \$10,3 juta. Kemajuan penerapan pembayaran mata uang lokal (LCS) Indonesia dan Malaysia serta antara Indonesia dan Thailand menunjukkan prospek atau tren peningkatan volume transaksi LCS yang baik (positif) dari tahun 2018 hingga 2021. Pengenalan LCS tidak meningkatkan perdagangan. Hal ini memegang peranan penting dibandingkan dengan perdagangan secara keseluruhan (Indonesia-Malaysia, Indonesia-Thailand). Sejak tahun 2018 hingga tahun 2021, peningkatan perdagangan LCS Indonesia dengan negara mitra kedua negara kurang dari 5% dari total perdagangan tahunan. Oleh karena itu, peneliti melakukan analisis lebih lanjut mengenai tantangan yang dihadapi untuk mendukung pengembangan implementasi LCS Indonesia di Malaysia dan Thailand. Berdasarkan hasil wawancara dengan Otoritas Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia, setidaknya terdapat tiga tantangan dalam penerapan LCS. Yakni keterlibatan pelaku ekonomi, peran pemangku kepentingan dalam mendukung LCS, dan keterlibatan tiga negara (Indonesia, Malaysia, dan Thailand) yang terlibat sebagai penyelenggara.

Ketiga tantangan tersebut merupakan faktor yang perlu diperhatikan untuk mempercepat kecepatan pengembangan LCS.

1. Pelaku Ekonomi Pelaku ekonomi sebagai pelaku transaksi niaga tentu mempunyai peranan penting dalam mewujudkan masyarakat lokal. Penyelesaian mata uang (penyelesaian mata uang lokal, LCS).
2. Peran Pemangku Kepentingan Peneliti melakukan analisis terhadap pemangku kepentingan atau peran yang terlibat dalam implementasi LCS dan membaginya menjadi dua bidang: pemangku kepentingan internal (terutama pendukung dan pendukung) dan pemangku kepentingan eksternal (pendukung sekunder).
3. Komitmen negara-negara yang bekerja sama Ketika dua negara atau lebih sepakat untuk bekerja sama, mereka

Kerja sama internasional yang berlangsung di Indonesia terdiri dari para menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari G20 yang menekankan betapa pentingnya pemulihan ekonomi yang kuat dan adil. Para pemimpin menggarisbawahi komitmen mereka untuk meningkatkan kerja sama internasional untuk mengatasi tantangan global dengan menggunakan pendekatan multilateral yang lebih kuat. Diharapkan pemulihan ekonomi dunia akan lebih baik pada tahun 2021 seiring dengan awal vaksinasi dan negara-negara

melonggarkan pembatasan sosial. Namun, prospek pemulihan ekonomi masih belum pasti dan tidak konsisten di berbagai negara. Dalam kasus sebelumnya, G20 telah menekankan bahwa menghindari pengurangan stimulus ekonomi yang terlalu dini untuk memastikan pemulihan ekonomi yang sukses.

Selain itu, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang tergabung dalam Grup G20 menegaskan komitmen mereka untuk mendukung negara-negara berpenghasilan rendah yang melakukan restrukturisasi utang untuk mengatasi peningkatan utang akibat pandemi di bawah Debt Service Suspension Initiative (DSSI). Selain itu, G20 akan mempertimbangkan untuk meningkatkan alokasi umum Hak Penarikan Khusus (SDR) untuk memenuhi pembiayaan internasional jangka panjang dan kebutuhan devisa negara-negara yang paling membutuhkan (*Badan Kebijakan Fiskal - G20 Tegaskan Pentingnya Kerja Sama Internasional Bagi Pemulihan Ekonomi Global*, n.d.).

Upaya yang di bisa di lakukan dalam mengatasi ketidakpastian yaitu dengan pengembangan industri berbasis teknologi tinggi dan digitalisasi ekonomi dalam UMKM. Selama dan setelah pandemi ini, sejumlah penelitian telah membahas kondisi dan komponen yang mendorong transformasi digital dalam bisnis dan kebijakan publik. Penelitian ini telah mempertimbangkan dampak transformasi digital pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja (Juergensen et al., 2020). Faktor pendukung yang diidentifikasi termasuk teknologi seperti media sosial, sumber daya pendidikan yang terbuka, promosi digital, dan penggalan data. Faktor-faktor ini membantu pengusaha muda mengatasi tantangan dan membantu mereka memulai bisnis baru (Steininger, 2019). Memahami dinamika digitalisasi UMKM dapat membantu bisnis dan organisasi membuat keputusan yang lebih baik tentang norma baru dalam bisnis. Pengusaha harus memperhatikan dua kemampuan TI yang mempengaruhi kinerja bisnis: infrastruktur TI yang fleksibel dan asimilasi TI. (Kee et al., 2019).

Peralihan ke E-commerce ini memberikan akses yang lebih luas kepada pelanggan. karena ledakan platform digital. Teknologi digital adalah kunci untuk mengelola perubahan strategi bisnis, terutama di sektor industri yang paling terkena dampak pandemi ini. Disamping itu, terdapat peningkatan yang signifikan dalam layanan online di banyak negara

dalam beberapa tahun terakhir, dan sekarang ada lebih banyak opsi di online daripada sebelumnya. (Farooq et al., 2019).

Dalam beberapa tahun terakhir, UMKM telah mengalami kemajuan besar, terutama di platform e-commerce. Berbagai bisnis menggunakan alat digital, termasuk keuangan, produksi, operasi, sumber daya manusia, dan pemasaran. (Baker & Nelson, 2018). UMKM perlu meningkatkan website dan layanan logistiknya untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Konektivitas internet sangat penting untuk produktivitas bisnis dan keamanan data pelanggan. Blockchain memiliki kemampuan untuk mempercepat transformasi digital dengan mengurangi masalah pengelolaan data (Rayes & Kayiasseh, 2017).

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan mendorong pilihan pembiayaan alternatif. Pemerintah menerbitkan sukuk negara ini sebagai bagian dari upayanya untuk mendapatkan sumber pembiayaan baru, terutama dari sektor keuangan syariah yang berkembang pesat di dalam negeri dan di luar negeri dalam beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 1992, sukuk global telah berkembang, dan diterbitkan oleh General Electric, perusahaan dari Amerika Serikat. Sukuk negara memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari surat utang negara (SUN) atau obligasi konvensional lainnya karena didasarkan pada prinsip keuangan Islam. Di antara perbedaan tersebut adalah penerbitan Sukuk Negara selalu memerlukan persetujuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, lembaga yang berwenang di bidang tersebut. (Wira et al., 2019).

Oleh karena itu, wirausahawan pasti akan menghadapi masalah di masa depan, karena itu mereka harus membuat rencana untuk meningkatkan kinerja bisnis mereka. (Yazid et al., n.d.). Yang bisa dilakukan adalah melakukan investasi di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Investasi tidak hanya dapat dilakukan pada bidang fisik, namun juga di bidang non-fisik. Investasi fisik termasuk pembangunan pabrik, tempat tinggal karyawan, mesin, dan peralatan, serta inventaris (bahan baku, produk setengah jadi, dan produk jadi). Pendidikan, pelatihan, migrasi, layanan kesehatan, dan lapangan kerja adalah contoh investasi non-fisik. Investasi pada sumber daya manusia adalah jumlah dana yang dikeluarkan selama proses investasi yang dikenal sebagai investasi non fisik. dan

kemampuan menghasilkan pendapatan. Keuntungan yang diperoleh dari proses investasi ini adalah pendapatan, dan karena tingkat pendapatan diharapkan meningkat, maka kita juga dapat meningkatkan konsumsi. Investasi semacam ini disebut sumber daya manusia (Simanjuntak, 1985).

Pengusaha, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan modal sebagai faktor produksi menghasilkan produk. Semakin baik kualitas sumber daya sehari-hari suatu negara, maka tingkat produktivitas dan efisiensi akan meningkat. Sejarah menunjukkan bahwa paradigma pembangunan berdimensi manusia memungkinkan negara-negara yang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk berkembang. Untuk meningkatkan produktivitas faktor produksi secara keseluruhan, dianggap penting untuk menekankan investasi manusia. Mungkin ada penurunan keuntungan di tanah, tenaga kerja, dan modal fisik, namun tidak untuk ilmu pengetahuan. Beberapa faktor yang membutuhkan peningkatan pendidikan agar pembangunan ekonomi dapat terjadi adalah:

1. Pendidikan tinggi meningkatkan pengetahuan masyarakat dan membuat mereka lebih berpikir logis, yang memungkinkan mereka untuk bertindak dan membuat keputusan yang lebih logis.
2. Pendidikan memungkinkan masyarakat mempelajari pengetahuan teknis yang diperlukan untuk mengelola dan mengelola bisnis kontemporer, serta aktivitas kontemporer lainnya.
3. Peningkatan pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan memotivasi reformasi di bidang teknik, ekonomi, dan banyak aspek kehidupan sosial lainnya.

Akibatnya, tingkat pendidikan yang semakin tinggi dapat terus meningkatkan tingkat penggunaan teknologi di masyarakat. Kami menyadari pentingnya peran pendidikan, sehingga artikel ini membahas tentang investasi dalam sumber daya manusia melalui pendidikan. Pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi., sehingga belanja pendidikan perlu dianggap sebagai investasi yang menguntungkan dan bukan sekedar investasi konsumsi dengan hasil yang tidak pasti (Nurulpaik, 2004). Strategi pemasaran adalah salah satu kunci utama keberhasilan bagi sebuah perusahaan untuk memasarkan produknya kepada pelanggan. Hal ini juga berlaku untuk seluruh pelaku usaha industri rumahan yang umumnya masih

mengalami kesulitan dalam memasarkan produknya. Selain itu, strategi pemasaran juga menjadi ujung tombak untuk mengembangkan kegiatan bisnis, karena tanpa menjalankan strategi pemasaran yang tepat, sebuah perusahaan akan sulit untuk bersaing di antara persaingan bisnis yang semakin sengit. Artinya, kegiatan usaha hanya akan berjalan dan tinggal di tempat yang stagnan tanpa didukung oleh manajemen yang baik, kualitas pelayanan dan produk pasar (Yusup, 2019). Manfaat investasi di bidang pendidikan di negara-negara berkembang umumnya relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan investasi dalam modal fisik: 20% berbanding 15%. Namun, di negara maju, investasi yang menguntungkan dalam bidang pendidikan lebih mahal daripada investasi dalam modal fisik: 13% berbanding 9%. Situasi ini disebabkan oleh fakta bahwa di negara-negara berkembang, jumlah pekerja terampil dan terdidik relatif terbatas dibandingkan dengan kebutuhan, sehingga meningkatkan pendapatan dan peningkatan manfaat pendidikan (MIN 1 KOTA BANDA ACEH, 2019).

Selain fungsi teknis dan ekonomi, investasi di bidang pendidikan juga mempunyai banyak fungsi lain, seperti fungsi sosial, kemanusiaan, politik, budaya, dan pendidikan. Pendidikan dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi dalam fungsi teknis perekonomian (teori sumber daya manusia). Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi (diukur berdasarkan lama bersekolah) mempunyai pekerjaan dan upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Jika upah mencerminkan produktivitas, semakin tinggi pendidikan penduduknya, semakin tinggi produktivitas upah dan tingkat pendidikan negara tersebut (Tobing, 2005). Kontribusi pendidikan terhadap pengembangan dan pemeliharaan pendidikan di berbagai lapisan masyarakat disebut sebagai fungsi pendidikan. Pada tingkat individu, pendidikan membantu siswa belajar untuk belajar dan guru belajar untuk mengajar. Masyarakat terpelajar diharapkan memiliki kecenderungan untuk belajar sepanjang hayat dan terus berkembang dan belajar karena mereka merasa tidak cukup informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi dan motivasi untuk melanjutkannya.

E. Conclusion

Mengingat ketidakpastian perekonomian global, Indonesia memerlukan

Strategi komprehensif untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tantangan yang ditimbulkan oleh fluktuasi perekonomian global, seperti harga komoditas dan pergerakan modal asing, berdampak pada perekonomian Indonesia yang sangat terbuka.

Di tingkat nasional, tantangan kesenjangan sosial, rendahnya produktivitas, dan terbatasnya infrastruktur mempersulit upaya mencapai tujuan pembangunan. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan fiskal dan moneter untuk menjawab tantangan tersebut.

Strategi utama yang diusulkan antara lain penguatan sektor ekonomi utama, perlindungan sosial bagi kelompok rentan, penguatan kerja sama internasional, dan inovasi ekonomi digital. Lebih lanjut, guna menjaga daya saing masyarakat di era ekonomi berteknologi tinggi, investasi pada pengembangan sumber daya manusia dinilai penting. Secara keseluruhan, pendekatan yang holistik dan terpadu diharapkan dapat memberikan landasan bagi Indonesia tidak hanya untuk bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi, namun juga untuk mencapai stabilitas masyarakat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

REFERENCES

- Adolph, R. (2016). *SPILLOVER From China*. 1–23.
- Azizah, S. N., & Salam, A. N. (2021). Working mother and family economy resilience in the covid-19 era: Evidence from Indonesia. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 14(3), 203-215.
- Badan Kebijakan Fiskal - G20 Tegaskan Pentingnya Kerja Sama Internasional Bagi Pemulihan Ekonomi Global*. (n.d.).
- Baker, T., & Nelson, R. E. (2018). *Creating Something from Nothing : Resource Construction through Entrepreneurial Bricolage* Author (s): Ted Baker and Reed E. Nelson Source : *Administrative Science Quarterly* , Vol . 50 , No . 3 (Sep . , 2005) , pp . 329-366 Published by : Sage Publicati. 50(3), 329–366.
- DepartemenKebijakan Ekonomidan Moneter. (2018). Tinjauan Kebijakan Moneter. *Bank Indonesia*, 53(9), 1689–1699. file:///C:/Users/User/Downloads/fvm939e.pdf

- Effendi, D., Rosadi, A., Prasetyo, Y., Susilawati, C., & Athoillah, M. A. (2021). Preparing Halal tourism regulations in Indonesia. *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage*, 9(1), 6.
- Farooq, Q., Fu, P., Hao, Y., Jonathan, T., & Zhang, Y. (2019). A Review of Management and Importance of E-Commerce Implementation in Service Delivery of Private Express Enterprises of China. *SAGE Open*, 9(1). <https://doi.org/10.1177/2158244018824194>
- Francisco, S., Glick, R., & Spiegel, M. M. (2015). *Federal Reserve Bank of San Francisco POLICY CHALLENGES IN A DIVERGING GLOBAL ECONOMY*. 1–145. <http://www.frbsf.org/economic-research/events/2015/november/>
- Hakim, A. A., Al Hakim, S., Hasanuddin, M., & Ridwan, A. H. (2017). Towards Indonesia halal tourism. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 17(2), 279–299.
- Janwari, Y. (2012). Penerapan Prinsip Tadrij dalam Proses Regulasi Perbankan Syariah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(2), 307–318.
- Janwari, Y. (2013). Tantangan dan Inisiasi dalam Implementasi Ekonomi Syariah di Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 12(2), 89–98. <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.969>
- Juergensen, J., Guimón, J., & Narula, R. (2020). European SMEs amidst the COVID-19 crisis: assessing impact and policy responses. *Journal of Industrial and Business Economics*, 47(3), 499–510. <https://doi.org/10.1007/s40812-020-00169-4>
- Kee, D. M. H., Yusoff, Y. M., & Khin, S. (2019). The role of support on start-up success: A pls-sem approach. *Asian Academy of Management Journal*, 24(March), 43–59. <https://doi.org/10.21315/AAMJ2019.24.S1.4>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Website PEN. In *Kementerian Keuangan Republik Indonesia* (pp. 6–7). <https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/mengapa-program-pen>
- Kusuma, S. W. D., & Amalia, N. D. (2019). SBSN PBS, dan Sukri sebagai instrumen pemerintah dalam pembiayaan APBN dan investasi masyarakat. *Asy-Syari'ah*, 21(1), 91–104.
- MIN 1 KOTA BANDA ACEH. (2019). Pendidikan Sebagai Investasi Jangka Panjang. In <https://www.Min1Bandaaceh.Sch.Id/Artikel/Pendidikan-Sebagai-Investasi-Jangka-Panjang/> (pp. 1–6). <https://bogorkab.go.id/post/detail/pendidikan-sebagai-investasi->

jangka-panjang

- Munandar, A., Salam, A. N., & Ridho, M. T. (2020). The Impact of Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership Free Trade Agreement on Indonesian Economy. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 8(1), 035. <https://doi.org/10.14421/grieb.2020.081-04>
- Nurulpaik, I. (2004). Pendidikan Sebagai Investasi. [http. Www. Pikiran-Rakyat. Com](http://www.pikiran-rakyat.com) Jakarta: LPFEUI.
- Rasyid, F. A., & Marta, M. S. (2020). Impact of organizational politics on proactive behavior of government employees: the moderating role of self-efficacy. Available at SSRN 3568285.
- Rayes, Z. O. Al, & Kayiaseh, H. M. A. (2017). *Demand and Supply Firms' Interlock: A Youth-Based Entrepreneurial Initiative BT - Leadership, Innovation and Entrepreneurship as Driving Forces of the Global Economy* (R. Benlamri & M. Sparer (Eds.); pp. 619–629). Springer International Publishing.
- Simanjuntak, P. J. (1985). *Pengantar ekonomi sumber daya manusia*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indo. <https://books.google.co.id/books?id=d36ZswEACAAJ>
- Sobana, D. H. (2021). THE EFFECT OF RETURN ON ASSETS, FIRM SIZE, AND FINANCING TO DEPOSIT RATIO ON THE STOCK PRICE OF PT. BRI SHARIA, TBK. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(2), 291-306.
- Steininger, D. M. (2019). Linking information systems and entrepreneurship: A review and agenda for IT-associated and digital entrepreneurship research. *Information Systems Journal*, 29(2), 363–407. <https://doi.org/10.1111/isj.12206>
- Suyandi, D. (2019). The effect of mudharabah financing productivity and increasing the member's capital business on the income of mardhotilah bmt members. *International Journal of Islamic Khazanah*, 9(1), 23-28.
- Syawie, M. (2011). 52807-ID-kemiskinan-dan-kesenjangan-sosial. *Jurnal Informasi*, 16(03), 213–219.
- Tobing, E. (2005). Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi. *Article On-Line*). Didapat Dari [Http://Www-Theindone-Sian-Institute. Org/Janeducfile. Htm](http://Www-Theindone-Sian-Institute.Org/Janeducfile.Htm). Internet.

- Tripalupi, R. I. (2019). Equity Crowdfunding Syari'ah Dan Potensinya Sebagai Instrumen Keuangan Syari'ah Di Indonesia. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 13(2), 229-246.
- Yazid, N., Badriyah, M., & Wira, S. (n.d.). *Naufal Yazid, Mila Badriyah, Suteja Wira, Persepsi Wirausahawan Atas Kontribusinya Terhadap Perekonomian I*, 59–73.
- Yusup, D. K. (2019). Multi Contract as A Legal Justification of Islamic Economic Law for Gold Mortgage Agreement in Islamic Bank. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 7(1), 1-20.
- Yusup, D. K. (2019). The effectiveness of business partnership to the marketing of home industry products. *Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales*, (24), 315-330.
- Yusup, D. K. (2022). Cyber Security Sharing Platform: Indonesia Approach in Law Enforcement of Financial Transaction Crimes. In *J. Legal Ethical & Regul. Isses* (Vol. 25, p. 1).
- Yusup, D. K. (2022b). *LAW ENFORCEMENT EFFORTS FOR ILLEGAL ONLINE INVESTMENT ENTITIES IN INDONESIA*. 15(2), 890–904. <https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-001054>
- Yusup, D. K., Badriyah, M., Suyandi, D., & Asih, V. S. (2020). Pengaruh bencana Covid-19, pembatasan sosial, dan sistem pemasaran online terhadap perubahan perilaku konsumen dalam membeli produk retail. *Http://Digilib.Uinsgd.Ac.Id*, 1(1), 1–10.
- Yusup, D. K., Saepurrohman, A., Burhanudin, U., & Ridwan, A. (2019). Economics and business learning strategies through public communication method in islamic higher education institution. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(10), 2770–2777.
- Wira, S., Kusuma, D., Amalia, N. D., & Jourdy, G. B. (2019). *Asy-Syari 'ah*. 21(1).